

ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Oleh:

Marchelino Daling

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: marchelinodaling@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja pada umumnya adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini dilakukan di Dinas PPKAD yang beralamat di Lingkungan 1 Kelurahan Pasan. Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus. Meningkatkan PAD merupakan hal yang harus dilakukan untuk peningkatan pendapatan disertai penghematan belanja.

Kata kunci : kinerja, APBD

ABSTRACT

Progress of work in general is the general point of view from the completeness in one event, to realize the aim, target, vision and mission. This research is meant to understand the working ethics from Region Budget Expenses from Northeast Minahasa region (APBD). This research are organize by Administrator finacial and asset departments.based from this research the writer conclude that the work ethics from the departments is not effective enough, this statement can be seen from how small the amount that has been planned. While for the expenses work ethics is considered effective by looking how small the amount that has been applied from the budget and we can look the impact in the Northeast Minahasa region for having an surplus in the rest of the allocated budget. Improving regional income is the major goal for increasing the profit that will be followed by expanse control.

Keywords : progress of work, region budget expenses

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan disusun berdasarkan SAP.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Minahasa Selatan dan pusat pemerintahan (Ibukota Kabupaten) Minahasa Tenggara terletak di Ratahan. Kabupaten ini baru berdiri sekitar 5 tahun dan sangat menarik untuk dibahas dikarenakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan kabupaten yang baru dan sudah bisa disejajarkan dengan pemerintah kabupaten lainnya yang sudah terlebih dahulu berdiri. ini juga merupakan suatu tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai kabupaten yang baru untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan APBD yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Survei pendahuluan yang dilakukan penulis pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menemukan bahwa jumlah PAD yang belum efektif dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terselenggaranya kemandirian daerah dikarenakan ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang besar. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana kinerja realisasi APBD, sehingga penulis mengangkat sebuah skripsi dengan judul Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009-2011.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik swasta (Bastian: 2006:5).

APBD

APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah, Adisasmita (2011:3). Mardiasmo (2009:58) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Mardiasmo (2009:63) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mendefinisikan belanja sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Kinerja

Mahsun (2006:25) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi individu maupun kelompok.

Evaluasi Kinerja

Mahsun (2006:65) menyatakan bahwa evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manajer publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagaimana visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik, Mahmudi (2010:12)

Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja (Rasio)

Marizka (2010:39) menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Mahsun (2006:152) menyatakan Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan yang dianggarkan. Marizka (2010:40) Rasio derajat desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Mahsun (2006:191) menyatakan rasio efektivitas pajak daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah.

Marizka (2010:41) mengungkapkan bahwa analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Mahsun (2006:152) menyatakan bahwa analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Marizka (2010:42) juga menyatakan bahwa rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Marizka, 2010:43).

Penelitian Terdahulu

Marizka (2010) melakukan penelitian dengan judul analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja realisasi pengelolaan APBD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan pemerintah kota Medan sudah cukup baik. Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama menganalisis kinerja APBD. Perbedaannya adalah pada objek penelitian.

Nurhayati (2008) melakukan penelitian dengan judul analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di kota Bitung dan menyimpulkan bahwa pemerintah kota Bitung memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pembangunan daerah itu sendiri. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah agar keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menggunakan beberapa rasio dalam menganalisis APBD yang ada di pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, hanya memakai selisih dan hanya mengukur APBD dari segi belanja.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Indrianto dan Supomo (2009:249) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung dan survei. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian

1. Jenis Data

- a) Data kualitatif adalah data-data yang tidak berwujud angka, berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.
- b) Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka, berupa data-data keuangan perusahaan atau organisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut dalam penulisan skripsi ini, yaitu data kualitatif dalam hal ini berupa gambaran umum Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan data kuantitatif adalah laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama periode tahun 2009 – 2011.

2. Sumber Data

- a) Data primer, Sugiyono (2010:137) yang menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pimpinan perusahaan atau organisasi.
- b) Data sekunder, menurut Sugiyono (2010:137) bahwa data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan pada pengumpul data, misalnya dokumen. Data sekunder yang diperoleh berupa catatan-catatan, laporan keuangan dan berbagai publikasi yang relevan terkait dengan masalah yang diangkat.

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kedua sumber data tersebut baik data primer maupun data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan

Studi lapangan adalah merupakan langkah-langkah pengumpulan data yang ditempuh penulis secara langsung dari lembaga pemerintahan yang menjadi objek penelitian dengan cara :

- a) Wawancara dengan pimpinan/pejabat pemerintah, wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan yang dibahas serta berhubungan dengan data yang diperlukan penulis.
- b) Peninjauan langsung atau observasi langsung tentang sistem kerja, terutama yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran belanja daerah.
- c) Pengamatan prosedur-prosedur atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dimana sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Terdapat 2 perhitungan dalam metode analisis yaitu analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja dimana didalamnya juga terdapat rasio-rasio perhitungan untuk membantu dalam penelitian ini yaitu:

- a) Analisis Varians Pendapatan
- b) Analisis Rasio Daerah Desentralisasi
- c) Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah
- d) Analisis Varians Anggaran Belanja
- e) Analisis Keserasin Belanja
- f) Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah :

1. Mempelajari struktur organisasi dan *job description* pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Melakukan wawancara dengan manajemen/pejabat pemerintah yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.
3. Mengambil keputusan dan memberikan saran-saran yang perlu terhadap hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan Kabupaten yang baru berdiri setelah dimekarkan dari Kabupaten Minahasa Selatan. Kabupaten ini berumur 5 tahun sejak dibentuk pada tanggal 23 Mei 2007. Seiring berjalannya waktu sejak diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri banyak hal yang harus dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan yang baik sebagai daerah yang baru. Dalam penelitian yang dilakukan, Kabupaten Minahasa Tenggara sedang berusaha dalam proses perbaikan pengelolaan keuangan yang baik sehingga nantinya bisa menjadi Kabupaten yang mandiri serta berhasil. Ada beberapa perhitungan yang dipakai oleh peneliti untuk nantinya membantu dalam proses menganalisis kinerja realisasi APBD Kabupaten Minahasa Tenggara periode tahun 2009-2011.

A. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Hasil Penelitian varians pendapatan periode 2009-2011

2009 : Rp 312.054.380.254 - Rp 325.477.622.776 = Rp -13.423.242.532

2010 : Rp 348.377.017.236 - Rp 354.613.217.831 = Rp -6.236.254.595

2011 : Rp 410.033.699.571 - Rp 414.029.606.501 = Rp -3.995.906.930

B. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelolah pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut perhitungan derajat desentralisasi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Hasil Penelitian rasio derajat desentralisasi periode 2009-2011 (Pendapatan asli daerah : Total Pendapatan daerah x 100%)

2009 : Rp 2.652.974.643 : Rp 312.054.380.254 x 100% = 0,85%

2010 : Rp 4.430.161.779 : Rp 348.377.017.236 x 100% = 1,27%

2011 : Rp 4.955.574.921 : Rp 410.033.699.571 x 100% = 1,21%

C. Analisis Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. Berikut data perhitungan rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Hasil Penelitian rasio efektifitas pajak daerah periode 2009-2011 (Realisasi pajak daerah : target pajak daerah x 100%)

2009 : Rp 494.211.440 : Rp 789.500.000 x 100% = 62,60%

2010 : Rp 860.341.888 : Rp 644.972.125 x 100% = 133,39%

2011 : Rp 1.342.371.293 : Rp 1.930.415.900 x 100% = 69,54%

D. Analisis Varians Anggaran Belanja

Analisis varians anggaran belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Perhitungan berikut menunjukkan varians anggaran belanja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Hasil penelitian varians anggaran belanja periode 2009-2011

2009 : Rp 293.038.761.939 - Rp 334.526.453.282 = Rp 41.487.691.343

2010 : Rp 282.996.595.191 - Rp 385.090.720.652 = Rp 102.094.125.461

2011 : Rp 129.074.072.054 - Rp 136.661.598.852 = Rp 7.587.526.798

E. Analisis Keserasian Belanja

Dalam menganalisis keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibedakan analisis untuk tahun 2009 dan tahun 2010 – 2011. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan komposisi belanja dimana untuk tahun 2009 komposisi belanja adalah belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan untuk tahun 2010 – 2011 digolongkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berikut perhitungan keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

- 2009 : Total belanja operasi : Total belanja x 100% (Rasio belanja operasi terhadap total belanja)
 Rp 159.943.276.966 : Rp 293.038.761.939 x 100% = 55%
 Total belanja modal : Total belanja x 100% (Rasio belanja modal terhadap total belanja)
 Rp 133.045.848.972 : Rp 293.038.761.939 x 100% = 45%
- 2010 : Total belanja langsung : Total belanja x 100% (Rasio belanja langsung terhadap total belanja)
 Rp 148.583.965.952 : Rp 282.996.595.191 x 100% = 52,50%
 Total belanja tidak langsung : Total belanja x 100% (Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja)
 Rp 134.412.629.239 : Rp 282.996.595.191 x 100% = 47,50%
- 2011 : Total belanja langsung : Total belanja x 100% (Rasio belanja langsung terhadap total belanja)
 Rp 225.615.235.750 : Rp 430.853.717.975 x 100% = 52,36%
 Total belanja tidak langsung : Total belanja x 100% (Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja)
 Rp 205.238.482.225 : Rp 430.853.717.975 x 100% = 47,6%

F. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Berikut perhitungan rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011:

- 2009 : Realisasi anggaran : Total anggaran x 100%
 Rp 293.038.761.939 : 334.526.453.282 x 100% = 87,60%
- 2010 : Realisasi anggaran : Total anggaran x 100%
 Rp 282.996.595.191 : Rp 385.090.720.652 x 100% = 73,49%
- 2011 : Realisasi anggaran : Total anggaran x 100%
 Rp 430.853.717.975 : Rp 471.778.576.385 x 100% = 91,33%

Pembahasan

Evaluasi Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memperbaiki realisasi APBD dari segi pendapatan asli daerah dan penghematan. Berikut ini merupakan beberapa hasil pembahasan kinerja realisasi APBD Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2009-2011:

a. Analisis Varians pendapatan

Dapat dilihat secara terperinci pergerakan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2009-2011 dari segi varians pendapatan tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi lebih kecil dari jumlah pendapatan yang dianggarkan, ini menunjukkan pendapatan pada Pemkab Minahasa Tenggara yang belum efektif. Aspek-aspek yang terdapat dalam PAD yang harus lebih ditingkatkan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Terlebih untuk aspek retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang merupakan pendapatan terbesar dalam PAD. Menjadi tugas dan tanggung jawab bagi Pemkab Minahasa Tenggara dalam menggarap pendapatan asli daerah yang merupakan aspek utama penunjang untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

b. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Analisis rasio derajat desentralisasi dimana pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah (%). jika dilihat tahun 2009 dan 2010 pendapatan asli daerah dari total pendapatan terjadi kenaikan sedangkan untuk tahun 2011 mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam perihal

derajat desentralisasi untuk tahun 2009-2011 memang belum menunjukkan perubahan atau pergerakan yang signifikan, untuk tahun 2011 saja terjadi penurunan. Pemkab Minahasa Tenggara sedang berupaya untuk terus memperbaiki kualitas serta hasil dalam rangka menunjang program untuk memajukan daerah. Derajat desentralisasi diperlukan untuk menilai kemampuan daerah dalam hal kemandirian dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. PAD yang baik dan signifikan akan sangat membantu dalam proses percepatan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pusat ataupun provinsi. Jika PAD bergerak ke arah yang lebih baik atau dengan kata lain berhasil maka Pemkab Minahasa Tenggara berhasil dalam penyelenggaraan daerah otonom dan akan sangat diperhitungkan dari Pemerintah Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Perlu diingat Pemkab Minahasa Tenggara belum menyentuh usia 5 tahun berdirinya Kabupaten tersebut.

c. Analisis Efektifitas Pajak Daerah

Efektivitas dinilai sangat perlu dalam segala bidang pekerjaan, organisasi swasta atau pemerintahan. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Efektivitas pajak daerah dinilai dari perbandingan realisasi pajak daerah dan target pajak daerah. Untuk hasil efektifitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat Hasil yang sangat signifikan diraih pada tahun 2010 walaupun tahun berikutnya mengalami penurunan kembali, jika mengacu pada penilaian analisis ketercapaian kegiatan maka pada tahun 2009 dan 2011 cukup berhasil dan tahun 2010 sangat berhasil. Merupakan suatu capaian yang sangat baik pada tahun 2010 oleh Pemkab Minahasa Tenggara dalam hal efektifitas pajak daerah. Menjadi pekerjaan yang berat untuk Pemkab Minahasa Tenggara dalam mencapai hasil efektifitas pajak daerah yang signifikan seperti pada tahun 2010 untuk tahun-tahun selanjutnya sehingga capaian yang signifikan akan membantu Pemkab Minahasa Tenggara dalam hal kemandirian daerah.

d. Analisis Varians Anggaran Belanja

Analisis varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Dapat dikatakan bahwa jumlah realisasi belanja pemerintah Kab Minahasa Tenggara lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2009 sampai dengan 2011. Jadi dengan kata lain untuk belanja Kabupaten Minahasa Tenggara paling besar berasal dari belanja modal yang didalamnya terdapat belanja barang dan jasa. Dengan hasil dari belanja yang realisasinya lebih kecil dari yang telah dianggarkan maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mendapatkan SILPA surplus (sisa lebih perhitungan anggaran). Kinerja yang baik dari segi belanja dilakukan Pemkab Minahasa Tenggara.

e. Analisis Keserasian Belanja

Perhitungan analisis keserasian belanja Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat dua hasil itu dikarenakan adanya 2 perhitungan yang dipakai untuk tahun 2009 dan 2010 dipakai rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja dan untuk tahun 2011 belanja operasi dan belanja modal diganti dengan belanja langsung dan tidak langsung. Dari hasil yang dapat untuk tahun 2009 sampai dengan 2011 belanja operasi (langsung) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara lebih besar dari belanja modal (tidak langsung). Ini dikarenakan di dalam belanja operasi terdapat belanja barang dan jasa yang merupakan pengeluaran terbesar dalam belanja Kabupaten Minahasa Tenggara.

f. Analisis Efisiensi Belanja

Perhitungan rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang memakai perhitungan realisasi anggaran dibagi dengan total anggaran hasilnya dari tahun 2009, berarti pemerintah melakukan penghematan anggaran dari total anggaran yang dianggarkan itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. jadi dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kembali mendapatkan SILPA surplus (sisa lebih perhitungan anggaran) dari efisiensi belanja. SILPA surplus yang dihasilkan dari efisiensi belanja suatu daerah sangat baik yang nantinya dipakai untuk tahun berikutnya ataupun untuk pengembangan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan :

1. Kinerja pendapatan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan periode 2009-2011 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu factor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi dari yang telah dianggarkan.
2. Kinerja belanja dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus lebih meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini akan sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan serta menunjang sebagai daerah otonomi yang mampu mandiri dan tidak sangat bergantung pada dana transfer.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mempertahankan efisiensi belanja yang telah dilakukan untuk periode tahun anggaran 2009-2011. SILPA surplus (sisa lebih perhitungan anggaran) yang didapat lewat periode 3 tahun sangat baik untuk dilanjutkan ke tahun-tahun selanjutnya dimana dari SILPA surplus tadi bisa dipakai untuk menunjang program-program lainnya dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita.2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Bastian. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta.
- Indrianto. Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Mahsun. 2006 *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mahmudi.2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi kedua. Unit Penerbit dan Percetakan. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.Yogyakarta.
- Mardiasmo.2009 *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Marizka. 2010. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nurhayati. 2008. Analisis Realisasi APBD Pemerintah Kota Bitung. *Skripsi*. STIE Eben Heazer. Manado
- Republik Indonesia. Permendagri No 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit BP.Cipta Jaya. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga Erlangga. Jakarta.